

MODEL KOMUNIKASI DALAM PROSES NEGOSIASI

(Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Model Komunikasi Dalam Proses
Negosiasi Antara BPLS Dengan Masyarakat Terdampak Dalam
Menyelesaikan Ganti Rugi Lapindo)

SKRIPSI



Oleh :

DINA RINDI ANGGARINA

NPM. 0943010069

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

SURABAYA

2013

MODEL KOMUNIKASI DALAM PROSES NEGOSIASI

(Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Model Komunikasi Dalam Proses Negoisasi Antara
BPLS Dengan Masyarakat Terdampak Dalam Menyelesaikan Ganti Rugi Lapindo)

Disusun Oleh :

DINA RINDI ANGGARINA

0943010069

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Catur Suratnoadji, M. Si

NPT. 3 6804 94 0028 1

Mengetahui,

DEKAN

Dra. Ec. Hj. Suparwati, Msi

NIP. 1 95507 181 983 022 001

MODEL KOMUNIKASI DALAM PROSES NEGOSIASI
(Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Model Komunikasi Dalam Proses Negoisasi Antara
BPLS Dengan Masyarakat Terdampak Dalam Menyelesaikan Ganti Rugi Lapindo)

Oleh:

DINA RINDI ANGGARINA

NPM. 0943010069

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur Pada tanggal 14 November 2013

Pembimbing Utama

Dr. Catur Suratnoaji., M.Si
NPT.368049400281

Tim Penguji:

1. Ketua

Juwito, S.Sos., M.Si
NPT. 3 7107 94 00361

2. Sekretaris

Dr. Catur Suratnoaji., M.Si
NPT.368049400281

3. Anggota

Dra. Dyva Claretta, M.Si
NPT. 3 6601 94 00251

Mengetahui,

DEKAN

Dra. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 195507081983022001

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proposal dengan judul “Model Komunikasi Dalam Proses Negoisasi” (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Model Komunikasi Dalam Proses Negoisasi Antara BPLS Dengan Masyarakat Terdampak Dalam Menyelesaikan Ganti Rugi Lapindo). Penulisan laporan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam rangka memenuhi tugas akademik guna melengkapi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.

Hasil laporan skripsi ini bukanlah kemampuan dari penulis semata, namun terwujud karena bantuan dan bimbingan dari Bapak DR. Catur Suratnoadji, M.Si selaku dosen pembimbing. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan proposal ini :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, MSi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Juwito, MSi sebagai Ketua Progdil Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak dan Ibu Dosen Progdil Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam materi perkuliahan.

4. Ayah dan Mama yang selalu memberi support dan dukungan doa serta tidak bosan-bosan mengingatkan saya untuk segera lulus serta my brother Reza Nanda yang selalu bikin emosi tetapi selalu memberikan doa dan dukungan. Lough u so much
5. Derry Ariyanti, Agni Ratih, Florence yang selalu memberikan support dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan proposal ini meskipun sedikit bawel.
6. My Super Twins Ony Dina Maharani yang selalu kasih dukungan biar gak males dan jadi semangatnya on fire.
7. Dan Yuamaaii yang sudah memberikan perhatian lebih dan support hebat buat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga dengan terselesainya laporan proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Surabaya, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Definisi Komunikasi	14
2.2.1 Fungsi Komunikasi	18
2.2.2 Hambatan Komunikasi	19
2.3 Model Komunikasi	20

2.3.1 Model Shannon Weaver	21
2.3.2 Model Newcomb.....	24
2.3.3 Model Westley MacLaen	26
2.3.4 Model Aristoteles	27
2.3.5 Model Schramm	28
2.3.6 Model Jakobson	30
2.4 Teori Pertukaran Sosial.....	32
2.5 Komunikasi Interpersonal	36
2.5.1 Pengertian Komunikasi Interpersonal.....	36
2.5.2 Komponan Komunikasi Interpersonal	37
2.6 Negoisasi	39
2.7 Kerangka Berpikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Definisi Operasional	44
3.2 Operasionalisasi Konsep	46
3.2.1 Komunikator	46
3.2.2 Pesan	47
3.2.3 Konteks.....	47
3.2.4 Komunikan	47
3.2.5 Model Komunikasi.....	48
3.2.6 Negoisasi	50
3.3 Lokasi Penelitian	51

3.4	Subjek Penelitian dan Informan	51
3.4.1	Subjek Penelitian.....	51
3.4.2	Informan Penelitian	52
3.5	Teknik Pengumpulan Data	54
3.6	Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		56
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	56
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo	56
4.1.2	Sejarah Dibentuknya BPLS	57
4.1.3	Visi, Misi, Dan Tujuan BPLS	58
4.2	Penyajian Data	62
4.2.1	Identitas Responden	62
4.3	Hasil Penelitian	66
4.3.1	Komunikator	67
4.3.2	Pesan Komunikasi	68
4.3.3	Konteks Komunikasi	69
4.3.4	Respon Komunikasi	70
4.3.5	Komunikan	71
4.3.6	Biaya	72
4.3.7	Keuntungan	73
4.3.8	Perbandingan	74
4.4	Pembahasan	75

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran	93
5.2.1	Saran Akademis	93
5.2.2	Saran Praktis	93
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Shannon Weaver	22
Gambar 2. Model Newcomb	24
Gambar 3. Model Westley dan MacLean	27
Gambar 4. Model Aristoteles	27
Gambar 5. Model Wilbur Schramm	29
Gambar 6. Model Jakobson	30
Kerangka Berpikir	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPLS	94
Lampiran 2. Panduan wawancara Mendalam	95
Lampiran 3. Transkrip Hasil wawancara informan I	97
Lampiran 4. Transkrip Hasil wawancara informan II	108
Lampiran 5. Hasil Transkrip Wawancara Informan III	115
Lampiran 6. Hasil Transkrip Wawancara Informan IV	124
Lampiran 7. Hasil Transkrip Wawancara Informan V	139
Lampiran 8. Foto Wawancara Informan I	147
Lampiran 9. Foto Wawancara Informan II	148
Lampiran 10. Foto Wawancara Informan III	149
Lampiran 11. Foto Wawancara Informan IV	150
Lampiran 12. Foto Wawancara Informan V	151
Lampiran 13. Foto Pembayaran Ganti Rugi	152

ABSTRAK

DINA RINDI ANGGARINA, 0943010069, MODEL KOMUNIKASI DALAM PROSES NEGOSIASI (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Model Komunikasi Dalam Proses Negosiasi Antara BPLS Dengan Masyarakat Terdampak Dalam Menyelesaikan Ganti Rugi Lapindo)

Luapan lumpur panas Lapindo merupakan semburan lumpur panas yang terjadi akibat aktivitas pengeboran gas bumi yang dilakukan oleh Lapindo. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi dalam proses negosiasi antara BPLS dengan Masyarakat terdampak dalam menyelesaikan ganti rugi Lapindo.

Landasan teori yang digunakan adalah Teori Pertukaran Sosial berdasarkan pada ide bahwa orang memandang hubungan mereka dalam konteks ekonomi dan mereka menghitung pengorbanan dan membandingkannya dengan penghargaan yang didapatkan dengan meneruskan hubungan itu. Mengacu pada teori yang digunakan peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara. Lokasi penelitian dilakukan di kantor pusat BPLS dan di rumah warga terdampak. Subyek dari penelitian ini adalah Kepala Pemberdaya dari Bidang Sosial BPLS dan warga terdampak lumpur Sidoarjo.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan adalah model komunikasi pertukaran sosial alir dua tahap. Dalam negosiasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan mengenai nilai dan proses ganti rugi. Kesepakatan tersebut tetap didasarkan kepada keputusan Dewan Pengarah.

Kata kunci : Model Komunikasi Pertukaran Sosial, Teori Pertukaran Sosial, Negosiasi.

ABSTRACT

Hot Mud overflowing of Lapindo represent the hot mud blast that happened of drilling activity of earth gas conducted by Lapindo. The target of this research is to know the communications model in negotiation process among BPLS with the Society affected in finishing ingemination Lapindo.

The Basis theory at this research used Social Exchange Theory pursuant to belong to the idea that people look into their relation in economic context and they calculate the sacrifice and compare it with the appreciation got by doin on that relation. Beyond at that theory a researcher use the observation method and interview the research location conducted in head office of BPLS and at home area of BPLS and citizen affected by mud Sidoarjo.

The results of this research indicate that the communications of taken is social exchange communications model emit a stream of two phases. In negotiation conducted yield of agreement concerning compensatory process and value. The agreement remains to be based on decision of Director Council.

Key Word : Communication Model Social Exchangemenet, Social Exchange Theory, Negotiation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Luapan lumpur panas Lapindo merupakan suatu semburan lumpur panas yang keluar dari perut bumi yang berada di daerah Porong Sidoarjo. Luapan lumpur ini bermula dari aktivitas pengeboran gas bumi yang dilakukan oleh Lapindo. Semburan lumpur panas itu muncul pertama kalinya pada 29 Mei 2006 sekitar pukul 05.00. terjadinya di areal persawahan Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sekitar 150 meter barat daya sumur Banjar Panji yang dikerjakan oleh Lapindo Brantas Inc. Selama tiga bulan Lapindo melakukan pengeboran vertikal untuk mencapai formasi geologi yang disebut Kujung pada kedalaman 10.300 kaki. Sampai semburan lumpur pertama itu, yang dalam dunia perminyakan dan gas disebut blow out, telah dicapai kedalaman 9.297 kaki (sekitar 3,5 kilometer). Kedalaman ini dicapai pada pukul 13.00 dua hari sebelum blow out. Sesuai kelaziman pada pengeboran di kedalaman tersebut, lumpur berat masuk pada lapisan disebut loss yang memungkinkan terjadinya tekanan tinggi dari dalam sumur keatas atau kick, antisipasinya menarik pipa untuk memasukkan casing yang merupakan pengaman sumur. Ketika penarikan pipa hingga 4.241 kaki, pada 28 Mei terjadi kick. Penanggulangan ini adalah dengan penyuntikan lumpur kedalam sumur. Ternyata bor macet pada 3.580 kaki, dan upaya pengamanan lain dengan disuntikkan semen. Bahkan pada hari itu dilakukan fish yakni pemutusan mata bor dari pipa dengan diledakkan. Kemudian yang terjadi adalah semburan gas dan lumpur pada subuh esok harinya.

Berdasarkan temuan Tim Geologi dari ITB menyatakan :

“ Luapan Lumpur Panas Porong – Sidoarjo adalah luapan lumpur yang keluar dari perut bumi akibat adanya patahan, rekahan yang ada di dalam perut bumi. Adanya patahan dan rekahan yang ada di perut bumi yang tertembus oleh proses pengeboran gas bumi menyebabkan timbulnya luapan lumpur panas pada permukaan bumi.” (Jawa Pos, 12 Oktober 2006, hal 16).

Dari beberapa kerugian yang di alami oleh masyarakat Porong ini akhirnya pihak Lapindo Brantas dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang menyetujui kerusakan – kerusakan yang dialami oleh masyarakat porong dengan membagi menjadi tiga ring. Ring I (Dampak Semburan) Desa Jatirejo, Ring II (Dampak Luberan) a. Desa Renokenongo b. Desa Kedungbendo c. Desa Siring d. Desa Keboguyang Ring III (Dampak Sosial) a. Desa Mindi b. Desa Kedungcangkring c. Desa Besuki d. Desa Pajarakan, Ring I (Dampak Semburan) dan Ring II (Dampak Luberan) menuntut : Ganti rugi penuh yang didasarkan pada nilai jual beli (secara material dan Imaterial) Secara material Nilai Jual Beli yang diharapkan masyarakat, tanah kering Rp. 1.500.000/ Per Meter, Tanah basah Rp. 1.000.000/Per Meter dan Bangunan Rp. 2.000.000/Per Meter. Lambatnya ganti rugi disebabkan PT. Lapindo Brantas tidak mau mengganti tanah yang bukti kepemilikannya berupa Petok D atau Letter C. padahal mayoritas tanah di wilayah tersebut bukti kepemilikan masih berupa Petok D atau Letter C.

Volume lumpur yang semakin besar tersebut, mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa. Menurut data Jawa Pos, 26 September 2006, volume

lumpur yang keluar dari pusat semburan semakin meningkat. Pada awal semburan pada tanggal 29 Mei 2006 – 29 Juni 2006, volume semburan 5.000 m³ per hari. Namun mulai awal Agustus volume Lumpur yang keluar rata-rata mencapai 126.000 m³ per hari. Ribuan orang mengungsi karena rumah mereka telah terendam. Ratusan hektar lahan pertanian juga gagal panen karena telah terendam lumpur. Puluhan pabrik juga telah merumahkan para pekerjanya karena tempat produksi mereka juga telah terendam lumpur. Selain itu, lumpur panas juga menenggelamkan jalan tol Surabaya-Malang. Padahal jalan tol ini merupakan akses utama yang menghubungkan Surabaya- Malang, selain jalan raya Porong. Sehingga yang terjadi kemudian, kemacetan yang luar biasa terjadi di Jalan Raya Porong yang menjadi satu-satunya akses terdekat yang menghubungkan Surabaya-Malang.

Dampak yang luar biasa tersebut, membentuk opini publik bahwa peristiwa ini dianggap sebagai bentuk pencemaran lingkungan yang sangat serius yang diakibatkan oleh eksplorasi kekayaan alam, khususnya minyak bumi dan gas. Semburan lumpur panas dianggap sebagai kesalahan PT. Lapindo Brantas Inc, sebagai perusahaan yang memiliki ijin beroperasi di sumur eksplorasi migas Banjar Panji-1 (BJP-1). Sehingga segala bentuk kerugian dan dampak negatif yang timbul harus menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc.

Berdasarkan permasalahan semburan lumpur yang berkembang maka diperlukannya suatu keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebab dari format komunikasi dari pihak BPLS sendiri,(2010) bahwa sesuai dengan indikator kinerja utama Bidang Sosial yaitu mengurangi dampak sosial, maka dalam rangka penanganan permasalahan sosial yang berkembang di atas, dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pemulihan sosial. sebagaimana contoh : Terkait dengan jual beli tanah dan bangunan telah terungkap sangat banyak permasalahan keluarga, misalnya kelengkapan administrasi dokumen jual beli tanah dan bangunan, pengingkaran keabsahan dokumen oleh salah satu pihak, tuntutan terhadap orang-orang yang semestinya tidak berhak melaksanakan jual beli, sengketa waris, pembagian harta pada keluarga yang mengalami poligami, kesalahan pembagian/ penggunaan harta hasil jual beli, dll. BPLS dalam hal ini berupaya untuk menjadi mediator agar permasalahan di atas dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait.

Dengan mengingat besar dan luasnya dampak semburan lumpur Sidoarjo, khususnya dalam masalah jual beli tanah dan bangunan, BPLS mengupayakan langkah-langkah yang bersifat fasilitasi sehingga jual beli tersebut dapat berjalan lebih lancar. Bentuk dari kegiatan fasilitasi ini antara lain adalah pembentukan tim verifikasi dokumen fisik tanah dan bangunan, melaksanakan peran-peran mediasi, penerus dan penyebar informasi, klarifikasi, dan pengorganisasian pelaksanaan verifikasi tersebut. Kegiatan fasilitasi lainnya adalah pelatihan keterampilan dalam rangka kemudahan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan berusaha menjalankan usaha mikro mandiri.

Lambatnya ganti rugi disebabkan PT. Lapindo Brantas tidak mau mengganti tanah yang bukti kepemilikannya berupa Petok D atau Letter C. padahal mayoritas tanah di wilayah tersebut bukti kepemilikan masih berupa Petok D atau Letter C. Sebanyak 81 berkas permohonan warga belum dilakukan pembayaran uang muka 20% dengan perkiraan nilai nominal 20% sebesar Rp. 6.667.180.400,-. Warga mendesak untuk segera dilakukan tindak lanjut terhadap berkasnya. Terhadap permasalahan ini, Bapel BPLS selalu khawatir tentang keamanan tanggul di desa Glagaharum karena hingga saat ini, para pegogol (pemilik tanah gogol) yang di atas tanahnya sudah dibangun tanggul, belum mendapatkan pembayaran 20%. Hal ini dapat menjadi potensi akan adanya perbuatan untuk menghambat proses pembuatan tanggul dan keamanan tanggul dari para pegogol di Desa Besuki. Berkas permohonan penyelesaian business to business (B to B) atas nama H. Hasan Kedungbendo dan beberapa pengusaha yang tergabung dalam GPKLL, masih belum tuntas pembayarannya. Akibat dari hal ini, Bapel BPLS mengalami hambatan dalam membangun tanggul di desa Kedungbendo karena dihalang-halangi oleh H. Hasan. Masih terdapat berkas permohonan warga sebanyak 227 berkas yang telah jatuh tempo pembayaran 80%, namun hingga saat ini masih belum menerima pembayaran/cicilan. Akibat dari permasalahan ini, Bapel BPLS juga mengalami hambatan dalam membangun tanggul di desa Kedungbendo karena dihalang-halangi oleh warga yang belum menerima pembayaran 80%. Masih terdapat kurang lebih 100 bidang tanah yang hingga saat ini tidak mengajukan permohonan jual beli karena warisan leluhur.

Namun demikian, mereka mempertanyakan bagaimana proses pengantiannya. BPLS, 2010.

Sampai dengan saat ini proses jual beli tanah dan bangunan sebagian warga terdampak yang menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas belum dapat diselesaikan sampai dengan saat ini, sementara penyelesaian proses jual beli tanah untuk warga 3 desa yang menjadi beban APBN harus diselesaikan sejalan dengan penyelesaian proses jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas tersebut. Dengan belum tuntasnya proses jual beli tanah dan bangunan tersebut, pembangunan dan peninggian tanggul di beberapa lokasi tidak dapat dilaksanakan karena dihalang-halangi oleh warga masyarakat yang belum mendapatkan pembayaran pelunasan dari PT. Lapindo Brantas, yang pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi kinerja Bapel-BPLS dalam menyelesaikan pembangunan kolam lumpur yang aman bagi warga masyarakat dan lingkungan.

Dari keterlambatan inilah akhirnya warga melakukan gerakan resistensi supaya hak – haknya terpenuhi. Di mulai dari musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dengan perwakilan Lapindo Brantas dan Pemerintah Sidoarjo sampai penutupan ruas jalan raya porong dan juga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sidoarjo.

Secara proses komunikasi antara pihak BPLS dan warga terdampak terdapat proses negoisasi antara warga dengan pihak BPLS kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana atau permasalahan sosial secara

umum. Selain hal itu negoisasi juga dimaksudkan sebagai teknik untuk menjaring aspirasi masyarakat. BPLS, (2012).

Berdasarkan proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak warga terdampak dengan BPLS terkait dengan jual beli tanah dan bangunan telah terungkap sangat banyak permasalahan keluarga, misalnya kelengkapan administrasi dokumen jual beli tanah dan bangunan, pengingkaran keabsahan dokumen oleh salah satu pihak, tuntutan terhadap orang-orang yang semestinya tidak berhak melaksanakan jual beli, sengketa waris, pembagian harta pada keluarga yang mengalami poligami, kesalahan pembagian atau penggunaan harta hasil jual beli. BPLS dalam hal ini berupaya untuk menjadi negosiator agar permasalahan di atas dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait namun kenyataannya hingga sampai sekarang proses tersebut masih belum terselesaikan.

Kenyataan di lapangan, Lapindo dan pemerintah baru memberikan informasi setelah adanya demo. Artinya, tidak ada upaya proaktif menyediakan informasi. merespon kalau ada reaksi. Tampaknya, baik public relation Lapindo atau pemerintah menerapkan silent strategy, lebih hati-hati dan bersifat hanya memberi respon.

Pentingnya penelitian ini dapat memberikan saran dalam mengatasi model komunikasi antara pihak BPLS dan masyarakat terdampak korban lumpur lapindo di wilayah Sidoarjo. Dalam penanganan dampak sosial, pemerintah melakukan, antara lain, meminta untuk menuntaskan pembayaran uang muka cash and carry 20 persen kepada korban di empat desa (Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan

Renokenongo) yang masuk dalam peta dampak lumpur 4 Desember 2006. Setelah itu menuntaskan pembayaran kepada seluruh warga yang masuk peta terdampak lumpur 22 Maret 2007 (warga Perum TAS I, Desa Gempolsari, Kalitengah, sebagian Kedungbendo). Dalam Perpres sudah diatur di pasal 15 bahwa untuk pembayaran ganti rugi di luar peta terdampak dibayar dengan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rumpopoy, (2009).

Wakil Rakyat di Senayan bersama Pemerintah sejak awal dinilai bersikap tidak tegas. Mereka seolah melupakan salah satu bencana alam nasional yang menjadi perhatian dunia ini. Penelitian ahli untuk menentukan entakah ini murni bencana alam atau kelalaian manusia, belum berdampak pada status legal dan kebijakan Pemerintah dan DPR yang sudah dan terus menggelontorkan dana rakyat. Kalau ini bencana yang ditimbulkan oleh karena human error, mengapa uang rakyat sudah dan akan terus dikorbankan untuk kepentingan orang atau kelompok orang yang mestinya menerima sanksi pidana maupun perdata, siapa pun dia. Triliunan rupiah uang rakyat Indonesia akan terus harus digelontorkan, dari aspek legal, turun status menggantung, karena pengadilan hanya menjatuhkan vonis kepada beberapa bawahan PT. Lapindo Brantas. Status menggantung itu sebenarnya, harus menjadi pertanyaan Wakil Rakyat di Senayan, karena pengeluaran anggaran Rp 1,3 triliun untuk 2012, dan akan terus bertambah seiring perkiraan Lumpur Sidoarjo kemungkinan masih berlangsung 30-an tahun.

Model komunikasi dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep negoisasi, negoisasi adalah proses komunikasi antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak yang terlibat konflik baik perorangan maupun kelompok yang

didalamnya terjadi diskusi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan tujuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam konflik kasus Lapindo, negoisasi merupakan komunikasi dua arah, yaitu antara BPLS sebagai komunikator dan terdampak sebagai komunikan atau saling bergantian. Ketegangan dalam komunikasi negoisasi bisa saja terjadi sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga antara penjual dan pembeli harus menemukan frame of reference. Dalam proses negoisasi masing-masing kedua belah pihak harus meletakkan negoisasi diatas segalanya untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama.

Pada kasus Lumpur Lapindo ini ditekankan pada perusahaan Lapindo sebagai pihak penanggung jawab yang memberikan ganti rugi kepada warga terdampak. Jadi bila hasil penelitian itu lebih kepada negoisasi yang sifatnya memaksa maka para korban pun hanya bisa menerima nasib yang tidak wajar oleh para penguasa kepentingan dan pasti tidak ada kepuasan dari pihak warga terdampak. DPRD sebagai lembaga pemerintahan yang mengontrol jalannya negoisasi ini bertujuan supaya proses negoisasi dalam pemberian ganti rugi kepada warga terdampak berjalan sesuai peraturan dan prosedur dan tidak ada dominasi dalam memberikan ganti rugi.

Berdasarkan proses negoisasi diatas, maka peneliti ingin menggambarkan model komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait pada proses negoisasi dalam menyelesaikan masalah ganti rugi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam proses negoisasi.

1.2 Perumusan Masalah

Dilihat dari uraian diatas maka dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Model Komunikasi dalam proses negoisasi antara BPLS dengan warga terdampak dalam menyelesaikan masalah ganti rugi Lapindo di Sidoarjo?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi dalam proses negosiasi antara BPLS dengan Masyarakat terdampak dalam menyelesaikan ganti rugi Lapindo.

1.4 Kegunaan penelitian

Hasil penelitian deskriptif kualitatif terhadap Model Komunikasi Antara BPLS dengan Masyarakat Terdampak dalam Menyelesaikan Ganti Rugi Lapindo ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu untuk menambah kajian Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan penelitian pada model komunikasi.
2. Kegunaan Praktis, yaitu memberikan kontribusi pada BPLS dalam menyelesaikan upaya proses negoisasi terhadap masyarakat terdampak.